



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran sekaligus sebagai sumber informasi dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

LKjIP Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai suatu pertanggungjawaban kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), menyajikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Setda Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja yang dapat mengukur capaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Penilaian capaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui pengukuran target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada, sumber daya keuangan yang tersedia dan sarana-prasarana yang dimiliki serta nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan staf, tugas pokok dan fungsi yang diemban telah dilaksanakan dengan lancar dan dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Semarang, 2019

KEPALA BIRO ORGANISASI

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19641104 198903 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi...	7
C. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
A. Perencanaan Strategis	9
1. Visi	9
2. Misi	14
3. Tujuan	14
4. Sasaran	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	32
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang ...	33

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018



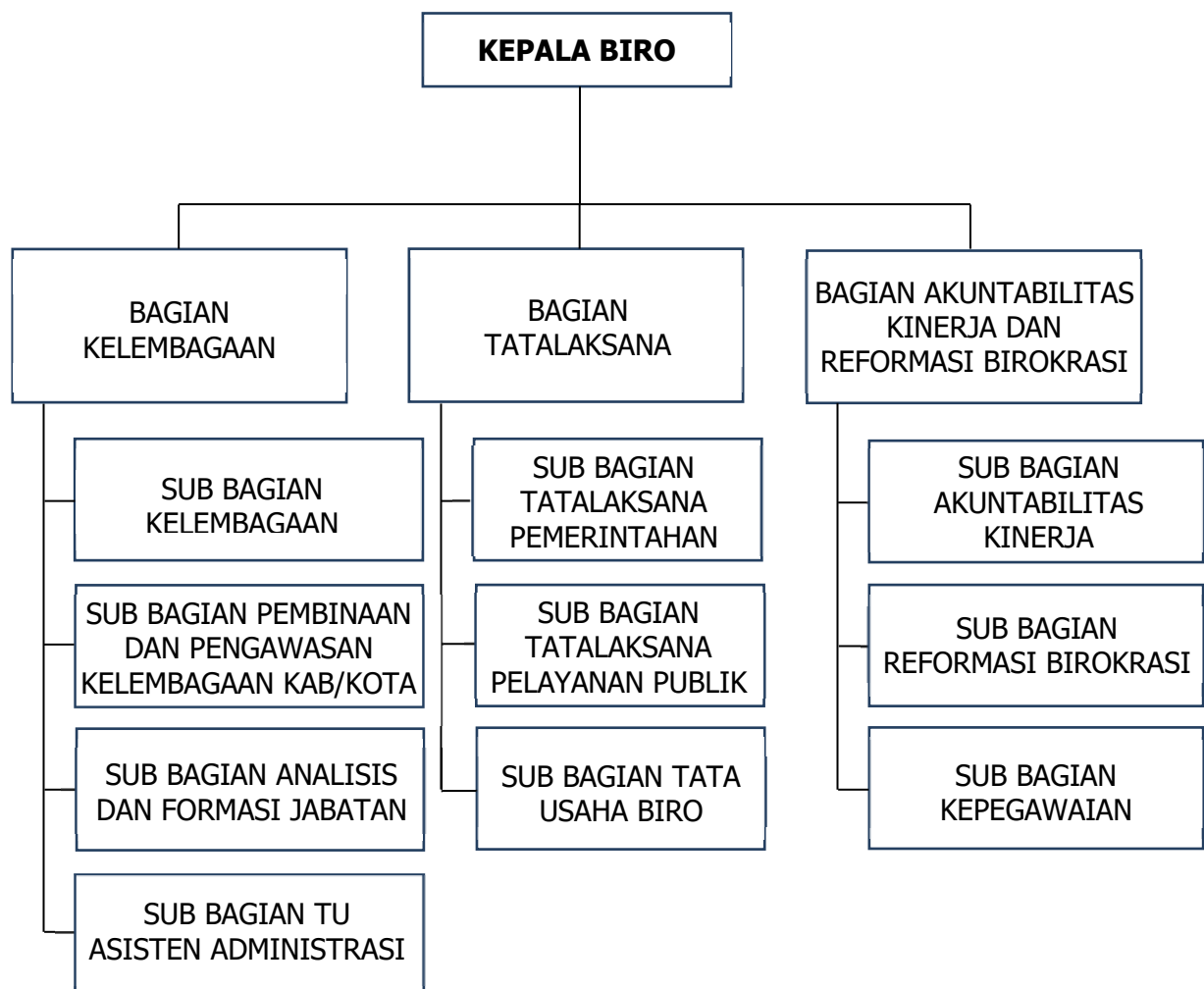
BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 8 Biro, satu diantaranya adalah Biro Organisasi. Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Organisasi
Setda Provinsi Jawa Tengah





Tugas Biro Organisasi adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana ,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
2. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Biro Organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang dibagi 3 bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kelembagaan kabupaten/kota, analisis dan formasi jabatan. Dan mempunyai fungsi, yaitu :



- a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan perangkat daerah;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan kabupaten/kota;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang analisis dan formasi jabatan;
 - d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup Asisten Administrasi di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tatalaksana pemerintahan, tatalaksana pelayanan publik dan tata usaha biro. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,



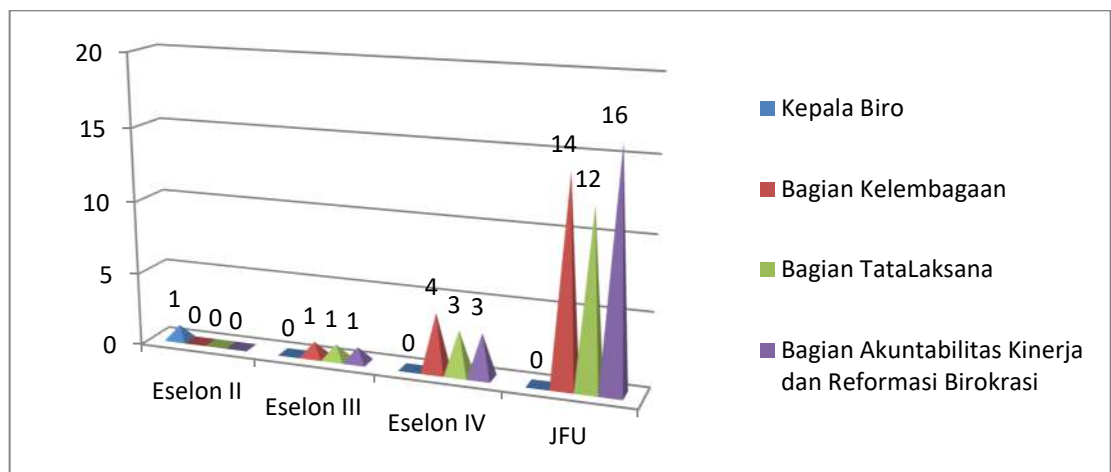
- pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tatalaksana pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang tatalaksana pelayanan publik;
 - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan kepegawaian. Dan mempunyai fungsi, yaitu :
- a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang akuntabilitas kinerja;
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,

pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang reformasi birokrasi;

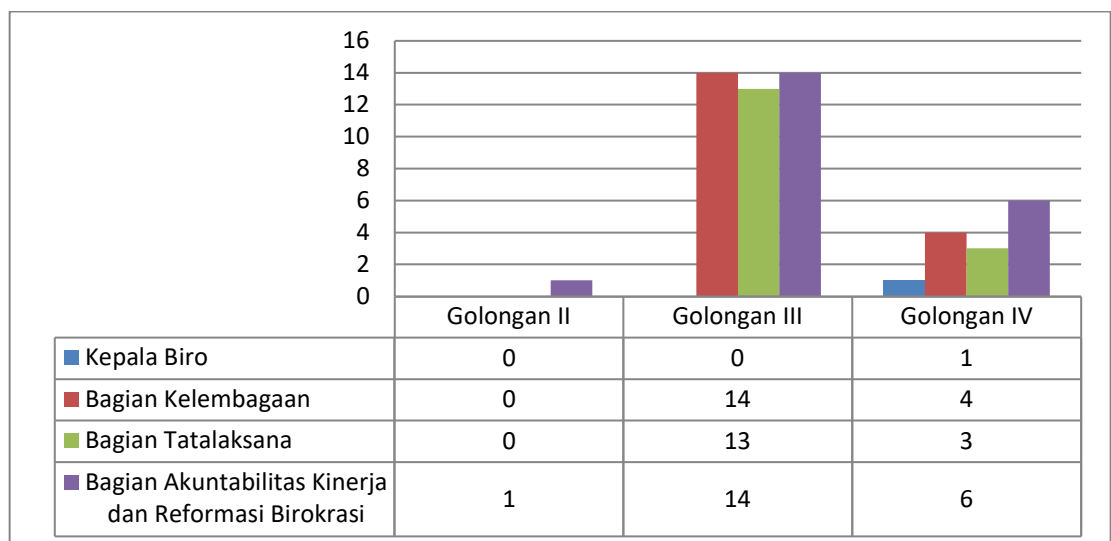
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan dan pelayanan administrasi secara terpadu serta pelaporan di bidang kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

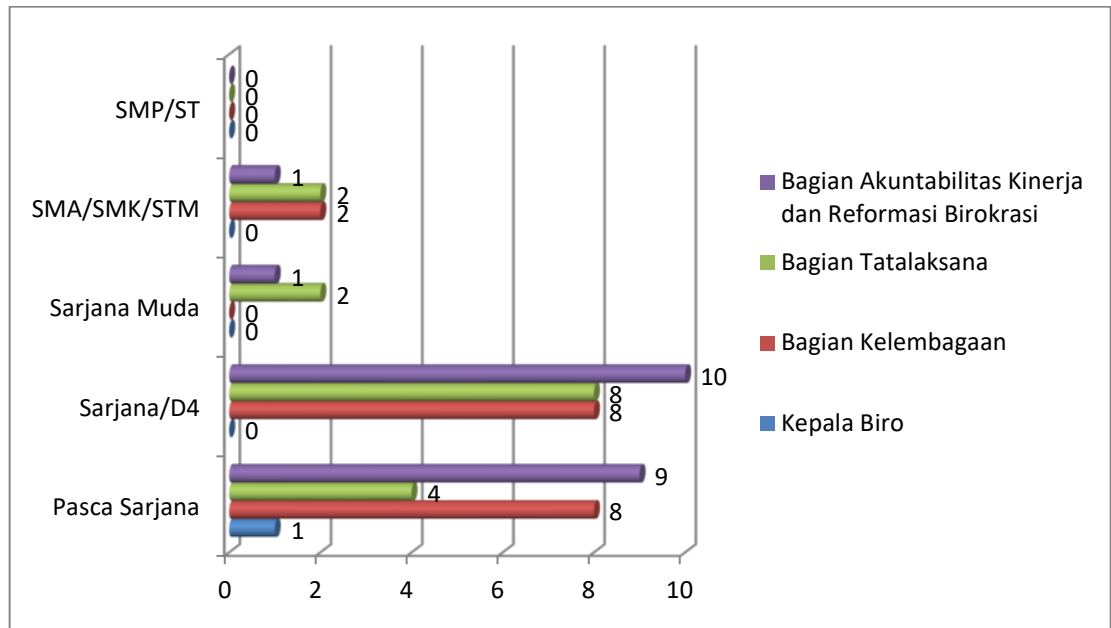
1. Menurut Jabatan/Eselon/JFU :



2. Menurut Golongan :



3. Menurut Tingkat Pendidikan :



4. Menurut jenis kelamin :

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	5	6
Kepala Biro	-	1	1
Bagian Kelembagaan	9	9	18
Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	6	10	16
Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	9	21
Total			56

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Biro Organisasi memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4		5 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2		3 Unit	Baik
3	Komputer		50 Unit	Baik
4	Laptop		5 Unit	Baik
5	LCD/in focus		3 Unit	Baik
6	Printer		30 Unit	Baik
7	Mesin Ketik Manual		11 Unit	Baik



B. Permasalahan Utama yang dihadapi Biro Organisasi

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah Belum efektif, efisien dan akuntabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

C. Sistematika Penulisan

Penulisan LKjIP Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Gubernur Jawa Tengah Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah



yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dengan adanya perubahan RPJMD 2013 – 2018 sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 juga mengalami perubahan, Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

Biro Organisasi yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Organisasi menjadi satu kesatuan dalam Renstra Setda Tahun 2013 – 2018.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. Sejahtera

Kondisi sejahtera menunjukkan kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi hak sosial dasar seperti akses pada pelayanan dasar mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak



huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial; peningkatan hubungan sosial masyarakat, mempunyai akses terhadap informasi; tersedianya prasarana dan sarana pelayanan publik serta pendukung perekonomian yang memadai dan terpelihara dengan baik mencakup jalan dan jembatan. Dalam pencapaian visi Jawa Tengah sejahtera maka upaya yang dilakukan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, indeks kebahagiaan, dan masyarakat mudah bekerja, yang menyangkut pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, akses aman air minum, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial, hubungan sosial masyarakat, dan akses terhadap informasi.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non fisik, serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, nasional, maupun internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadisendi gerak kerja bersama yang saling menghormati. Berdikari dalam membangun ekonomi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan kekuatan yang ada melalui eksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberdayaan



masyarakat dan mencapai daya saing yang kompetitif utamanya menuju kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

Dalam upaya pencapaian visi Jawa Tengah berdikari yang difokuskan pada pangan dan energi dilakukan melalui eksplorasi seluruh potensi IPTEK, kearifan lokal, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, SDM dan kerjasama; serta peningkatan keterampilan, pengetahuan, peluang dan pengembangan diri masyarakat.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 2) Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang



perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri diatas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan "kail dan jala". Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada dilingkungan masyarakat.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.



Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” bukan hanya sekedar tidak melakukan korupsi dan tidak menipu, melainkan benar-benar menjadi nilai-nilai, sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pemangku kepentingan dalam segala aspek kehidupan untuk mendukung perwujudan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

Dalam rangka mengimplementasikan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, perlu didukung melalui penataan regulasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin transparan dan akuntabel serta peningkatan sistem pengawasan internal.



2. Misi

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi";
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

3. Tujuan

Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a). Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah;



- b). Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah;
- c). Meningkatnya efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Organisasi dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Biro Organisasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1) Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	75%	80%
			2) Jumlah kab./kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran	28	31
			3) Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan	75%	90%
			4) Persentase OPD yang ketatalaksanaan nya baik	55%	60%
			5) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	24 OPD/UPP	28 OPD/UPP
			6) Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO	31 UPP	34 UPP
			7) Prosentase OPD yang SAKIP nya baik	80%	90%
			8) Prosentase OPD yang baik budaya kerjanya	25%	30%



			9) Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.	100%	100%
--	--	--	---	------	------

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2018. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Biro Organisasi, yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah. Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi pada Tahun 2018 dituangkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; kemudian dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 7.408.850.000,- (Tujuh milyar empat ratus delapan juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 6.995.100.000,- dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 413.750.000,-. Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).



Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Organisasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, secara lengkap tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2018, Biro Organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Rencana Strategis Biro Organisasi, terdapat sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :



Sasaran Strategis : Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis terdiri dari 9 (sembilan) indikator yaitu :

1. Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan.
4. Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik.
5. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM.
6. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO.
7. Prosentase OPD yang SAKIP nya baik.
8. Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya.
9. Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2****Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

No.	Indikator Kinerja	Real. 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	75%	80%	80%	100%	80%	100%
2.	Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran.	28	31	31	100%	31	100%
3.	Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan.	75%	90%	90%	100%	90%	100%
4.	Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik.	55%	60%	60%	100%	60%	100%
5.	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM.	24 UPP	28 UPP	60 UPP	214,28%	28 UPP	214,28%
6.	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO.	31 UPP	34 UPP	34 UPP	100%	34 UPP	100%
7.	Prosentase OPD yang SAKIP nya baik.	85,42%	90%	100%	111,11%	90%	111,11%
8.	Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya.	100%	30%	30%	100%	30%	100%
9.	Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis							113,57%

Untuk indikator kinerja **Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 80% terealisasi sebesar 80%.



Gambar 3.1 Rakor Pengendalian Penyelenggaraan Cabang Dinas

Target ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara apabila dibandingkan dengan target

jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 831.559.950,- atau 97,83% dari total pagu sebesar Rp 850.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 18.440.050,- atau 2,17% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Untuk indikator kinerja **Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 31 Kab./Kota terealisasi sebanyak



Gambar 3.2 FGD Kelembagaan Perangkat Kab./Kota

31 Kab./Kota. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 2 Kab./Kota dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka**

menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 442.773.505,- atau 98,39% dari total pagu sebesar Rp 450.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 7.226.495,- atau 1,61% dari pagu yang ditentukan. **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk indikator kinerja **Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan** tercapai 100% atau dengan



Gambar 3.3 Workshop Penyusunan ABK

kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 90% terealisasi sebesar 90%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 15% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 690.453.240,- atau 98,64% dari total pagu sebesar Rp 700.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 9.546.760,- atau 1,36% dari pagu yang ditentukan. **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum dengan kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah.

Untuk indikator kinerja **Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 60% terealisasi sebesar 60%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target yang



Gambar 3.4 BinteK Penyusunan Peta Proses Bisnis

telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 871.521.625,- atau 97,38% dari total pagu sebesar Rp 895.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 23.478.375,- atau 2,62% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dibidang Ketatalaksanaan
2. Kegiatan Pengembangan Ketatalaksanaan.



Gambar 3.5 BinteK Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk indikator kinerja **Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM** tercapai 214,28% atau dengan kategori

Sangat Baik, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 24 UPP terealisasi sebanyak 60 UPP hal tersebut dapat tercapai dikarenakan dengan adanya perubahan kebijakan untuk mempercepat progres capaian yang pada awalnya hanya difasilitasi Biro Organisasi menjadi dilaksanakan secara mandiri sementara Biro Organisasi hanya melaksanakan asistensi. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 36 UPP dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 214,28%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 671.616.050,- atau 79,01% dari total pagu sebesar Rp 850.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 178.383.950,- atau 20,99% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.



Gambar 3.6 Bintek Kompetisi Inovasi Yanblik

Untuk indikator kinerja **Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebanyak 34 UPP terealisasi sebanyak 34 UPP. Target ini apabila

dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebanyak 3

UPP dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 588.866.700,- atau 89,89% dari total pagu sebesar Rp 655.100.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 66.233.300,- atau 10,11% dari pagu yang ditentukan. **Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Pendampingan Penerapan SMM dan Sertifikasi ISO.

Untuk indikator kinerja **Prosentase OPD yang SAKIP nya baik** tercapai 111,11% atau dengan kategori **Sangat Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 90% terealisasi sebesar 100%, hal tersebut tercapai diantaranya dengan



Gambar 3.7 Fasilitasi Penguatan SAKIP

adanya komitmen dan pemahaman Kepala Perangkat Daerah dalam manajemen kinerja atau SAKIP semakin meningkat. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 14,58% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 111,11% sehingga sudah melampaui apa yang telah ditargetkan. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran**

Strategis dalam indikator kinerja ini sebesar Rp 993.550.450,- atau 99,36% dari total pagu sebesar Rp 1.000.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 6.449.550,- atau 0,64% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan SAKIP.
2. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.



Gambar 3.8 FGD Pembahasan Road Map RB

Untuk indikator kinerja **Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 30% terealisasi sebesar 30%. Target ini apabila dibandingkan **dengan Tahun 2017** mengalami peningkatan sebesar 5% dimana dari target yang telah ditentukan. Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100%. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 642.782.421,- atau 93,16% dari total pagu sebesar Rp 690.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 47.217.579,- atau 6,84% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja.

2. Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi.

Untuk indikator kinerja **Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu** tercapai 100% atau dengan kategori **Baik**, dimana dari target yang telah ditentukan sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Target ini tidak dapat dibandingkan **dengan Tahun 2017** dikarenakan indikator ini menggunakan data non kumulatif.



Gambar 3.9 Kegiatan Pelayanan Adm. Kepegawaian

Sementara **apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Organisasi telah tercapai 100% ini dikarenakan indikator ini menggunakan data non kumulatif. **Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** sebesar Rp 338.314.625,- atau 84,58% dari total pagu sebesar Rp 400.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 61.685.375,- atau 15,42% dari pagu yang ditentukan. **Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dalam indikator kinerja ini** adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun **Hambatan dan kendala** dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :



1. Dengan adanya penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dicermati dan disesuaikan kembali.
2. Belum adanya pedoman kamus kompetensi teknis dari Kementerian – Kementerian terkait sehingga belum dapat di susun Standar Kompetensi Jabatan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
3. Belum terbitnya beberapa regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah.
4. Belum terbitnya beberapa regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Rumah Sakit, Kesbangpol, dan BPBD).
5. Ketidaktahuan tentang kebijakan terkait ketatalaksanaan karena kurangnya sosialisasi pada tataran internal Perangkat Daerah.
6. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan terkait ketatalaksanaan sehingga pada tataran implementasi menjadi tidak sesuai.
7. Mind set pegawai maupun Perangkat Daerah yang menganggap bahwa norma, standar, petunjuk dan ketentuan bukan hal krusial yang wajib dilaksanakan.
8. Banyaknya kebijakan yang sejenis yang diatur oleh lembaga/kementerian sehingga pada tataran implementasi menjadi membingungkan.



9. Pejabat pengampu ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) tidak mengawal secara intens.
10. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam memasukkan data capaian kinerja kedalam aplikasi E-SAKIP.
11. Pengumpulan capaian data kinerja RPJMD Perangkat Daerah masih kurang tepat waktu.
12. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti Surat Edaran atau hasil Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja.
13. Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2013 – 2023 belum jelas target dan indikator capainnya.

Alternatif Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala.

1. Melakukan desk penyusunan Peta Jabatan dan formasi pegawai dengan Perangkat Daerah pasca penataan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.
2. Menyusun konsep kamus Kompetensi Teknis di lingkungan Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait dan berkerja sama dengan konsultan dan diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk di validasi.
3. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menertibkan regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Melakukan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan ketatalaksanaan ke Perangkat Daerah, antara lain berupa sosialisasi secara intens dengan tindak lanjut dalam bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada tataran internal Perangkat Daerah.



6. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penegakan kebijakan pada lingkup tatalaksana (antara lain sidak penggunaan pakaian dinas).
7. Menyampaikan usulan kepada Pusat untuk melakukan proses koordinasi dan sinkronisasi pada saat membuat suatu kebijakan sehingga hanya ada satu kebijakan untuk satu urusan yang sama (kebijakan yang dikeluarkan selaras antara yang satu dengan yang lain).
8. Mendorong Perangkat Daerah dalam pengisian data capaian kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP.
9. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Perangkat Daerah.
10. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2023 dengan target dan indikator capaian yang jelas beserta renaksi sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 7.408.850.000,- (Tujuh milyar empat ratus delapan juta, delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp.	0,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	7.408.850.000,-
3. Belanja Modal sebesar	Rp.	0,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 6.595.100.000,-	Rp. 6.227.342.141,-	94,42%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 400.000.000,-	Rp. 338.314.625,-	84,58%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 413.750.000,-	Rp. 387.055.939,-	93,55%
JUMLAH TOTAL		Rp. 7.408.805.000,-	Rp. 6.952.712.705,-	93,84%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar Rp. 262.639.785,- atau 4,80%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar 5.468.607.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.270.333.115,-, sedangkan pada Tahun 2018 terdapat efisiensi sebesar Rp. 456.137.295,- atau 6,16%, dimana pagu yang ditetapkan sebesar Rp. 7.408.805.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.952.712.7055,-, sehingga realisasi efisiensi anggaran belanja Tahun 2018 apabila dibanding Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,36%.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Biro Organisasi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tatalaksana ,dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan **dengan kategori Sangat Baik**, yang dapat menyelesaikan Isu Strategis atau permasalahan utama. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi" pada tahun 2018 sebesar **113,57% (Sangat Baik)**.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran" sebesar 100% (Baik).
3. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Jumlah Kab./Kota yang OPD nya tepat fungsi dan tepat ukuran" sebesar 96.77% (Baik).



4. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase OPD yang sudah memiliki Peta Jabatan dan Kompetensi Jabatan" sebesar 100% (Baik).
5. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase OPD yang ketatalaksanaannya baik" sebesar 100% (Baik).
6. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM" sebesar 214,28% (Sangat Baik).
7. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikat ISO" sebesar 100% (Baik).
8. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase OPD yang SAKIP nya baik" sebesar 111,11% (Sangat Baik).
9. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase OPD yang baik Budaya Kerjanya" sebesar 100% (Baik).
10. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis pada indikator kinerja "Prosentase pelayanan administrasi kepegawaian pelayanan tepat waktu." sebesar 100% (Baik).
11. Tingkat efisiensi total penggunaan anggaran Biro Organisasi untuk pencapaian target kinerja Tahun 2018 sebesar 6,16%.
12. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dicapai untuk Program Pemerintahan Umum sebesar 94,42%
13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dicapai untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 84,58%
14. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dicapai untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 93,55%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa mendatang antara lain :



1. Perlu perbaikan perencanaan, agar program dan kegiatan diorientasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menertibkan regulasi terkait penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyampaikan usulan kepada Pusat untuk melakukan proses koordinasi dan sinkronisasi pada saat membuat suatu kebijakan sehingga hanya ada satu kebijakan untuk satu urusan yang sama (kebijakan yang dikeluarkan selaras antara yang satu dengan yang lain).
4. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2023 dengan target dan indikator capaian yang jelas beserta renaksi sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi.
5. Membangun Sistem/Aplikasi yang bisa menjadikan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas bisa lebih tertib, efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Biro Organisasi semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, 2019

Kepala Biro Organisasi

Dr. Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641104 198903 1 013